

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar)**

Oleh :

Pakar Firdaus

Pembimbing : Andreas dan Yuneita Anisma

Faculty of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

email : pakar_firdaus@yahoo.co.id

*Effect Of Financial Administration Officials Competence, Local Financial
Monitoring And Information Technology Utilization To The Information
Value Of Local Government Financial Reporting Information
(Empirical Study In SKPD Kampar District)*

ABSTRACT

The research purpose is for testing empirically effect of the competence financial administration officials, the local financial monitoring and information technology utilization to the value of local government financial reporting information on SKPD in Kampar district. The analytical method used is that in the multiple regression t test to see the effect of each independent variable on the dependent variable. This research uses primary data by distributing questionnaires to a sample of 102 people from Echelon 2 and 3 at SKPD Kampar District Government. Based on the analysis, it is known that the independent variables that have an influence on the information value of local government financial reporting information is competence of the financial administration officials, local financial monitoring and information technology utilization. The coefficient determination of this research is 13.6%, while 86.4% explained by other variables not included in this research model.

Keyword : information value, financial administration officials competence, local financial monitoring and information technology utilization.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Apakah laporan keuangan menurut UU No 17 Tahun 2003 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan telah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Seperti fenomena yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar tahun 2013 ternyata belum ada perbaikan dari tahun - tahun sebelumnya. Pada Semester I Tahun 2014 BPK

Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2013. Bukti nyata hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Kampar pada tahun – tahun sebelumnya (<http://bpk.go.id/>). Opini WDP yang diberikan oleh BPK disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal dan lemahnya pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar masih belum memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah. Mengingat bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah merupakan unsur nilai informasi yang penting diterapkan terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005). Untuk menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah agar bermanfaat bagi para pengguna informasi, maka laporan keuangan harus disusun oleh pejabat

penatausahaan keuangan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi agar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan ini tidak menyesatkan bagi para pengguna informasi.

Hal selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2002:78).

Dan terakhir, yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar?, 2) Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar?, 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji : 1) pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar.

, 2) pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar, 3) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kampar,

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) bagi peneliti, Dengan melakukan penelitian ini akan lebih memahami penerapan teori-teori yang telah diperoleh dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian antara teori yang dipelajari dengan fakta yang terjadi. 2) bagi akademis,

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademis dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 3) bagi pemerintah, Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

TELAAH PUSTAKA

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara (Suwardjono, 2005). Sedangkan menurut FASB dalam *Statement Offinancial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statemen keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Nilai Informasi Keuangan

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- 3) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat

dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

- 4) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Menurut keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 (dalam Yuliarta 2013) ditentukan bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten adalah keharusan bagi pemerintah. Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini biar lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan dari segi kompeten pejabat dalam pengelola keuangan pemerintah.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yosa (2010) menyatakan yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003).

Pengaruh Antar Variabel Dan Hipotesis

a. Pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah

Kompetensi sangat dibutuhkan bagi seorang tenaga kerja terutama pada pejabat penatausahaan keuangan pemerintah. Apabila pejabat penatausahaan akuntansi tidak memiliki kompetensi yang baik serta tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi, maka akan menimbulkan hambatan dalam

pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. Kemudian pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, juga akan berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan. Semakin baik kompetensi pejabat penatausahaan yang dilakukan oleh SKPD, maka akan semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H1 : *Kompetensi pejabat penatausahaan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

b. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

Fungsi pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, bila ternyata adanya ditemukan hambatan atau penyimpangan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut dapat segera diatasi dan dapat segera diambil tindakan koreksi. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan perlu adanya pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terhindar dari

tindakan penyelewengan dan kecurangan seperti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan karena jika pengawasan dilakukan secara terus-menerus, maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H2 : *Pengawasan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*

c. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi.

Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :
 H3 : *Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Penelitian ini juga diarahkan pada objek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang ada di Kabupaten Kampar.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD pemerintah daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Kampar. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah pejabat eselon 2 dan 3 pada SKPD pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang berjumlah 34 SKPD. Dari kriteria pejabat eselon 2 dan 3 pada setiap SKPD akan diambil 3 responden yaitu Kepala Dinas masing-masing SKPD, Kepala bagian pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas, Kepala sub bagian perencanaan akuntansi/penatausahaan keuangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada masing-masing kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar

yang telah memenuhi kriteria menjadi obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indicator dengan total skor konstruk. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid.
2. Apabila nilai r hitung $<$ r tabel maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 1
Uji Validitas

No	Indikator	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1.	Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X ₁)	X _{1,1}	0.752	0.200	VALID
		X _{1,2}	0.776	0.200	VALID
		X _{1,3}	0.630	0.200	VALID
		X _{1,4}	0.429	0.200	VALID
		X _{1,5}	0.648	0.200	VALID
		X _{1,6}	0.560	0.200	VALID
		X _{1,7}	0.629	0.200	VALID
		X _{1,8}	0.600	0.200	VALID
		X _{1,9}	0.674	0.200	VALID
		X _{1,10}	0.728	0.200	VALID
2.	Pengawasan Keuangan daerah (X ₂)	X _{2,1}	0.398	0.200	VALID
		X _{2,2}	0.591	0.200	VALID
		X _{2,3}	0.484	0.200	VALID
		X _{2,4}	0.458	0.200	VALID
		X _{2,5}	0.502	0.200	VALID
		X _{2,6}	0.554	0.200	VALID
		X _{2,7}	0.512	0.200	VALID
		X _{2,8}	0.409	0.200	VALID
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	X _{3,1}	0.807	0.200	VALID
		X _{3,2}	0.735	0.200	VALID
		X _{3,3}	0.788	0.200	VALID
		X _{3,4}	0.774	0.200	VALID
		X _{3,5}	0.699	0.200	VALID

		X _{3,6}	0.721	0.200	VALID
		X _{3,7}	0.762	0.200	VALID
		X _{3,8}	0.719	0.200	VALID
4.	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y.1	0.337	0.200	VALID
		Y.2	0.505	0.200	VALID
		Y.3	0.442	0.200	VALID
		Y.4	0.403	0.200	VALID
		Y.5	0.376	0.200	VALID
		Y.6	0.414	0.200	VALID
		Y.7	0.407	0.200	VALID
		Y.8	0.423	0.200	VALID
		Y.9	0.344	0.200	VALID
		Y.10	0.450	0.200	VALID
		Y.11	0.471	0.200	VALID
		Y.12	0.233	0.200	VALID
		Y.13	0.231	0.200	VALID

Sumber : Data Olahan 2015

Pada tabel 1 uji validitas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah lebih besar dibanding nilai r_{tabel} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS merupakan fasilitas untuk mengukur

realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab semua item pernyataan penelitian.

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X ₁)	0.884	0.60	Reliabel
Pengawasan Keuangan daerah (X ₂)	0.785	0.60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	0.925	0.60	Reliabel
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0.753	0.60	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2015

Pada tabel 2 uji reliabilitas menunjukan nilai *cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0.60, sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, pengawasan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

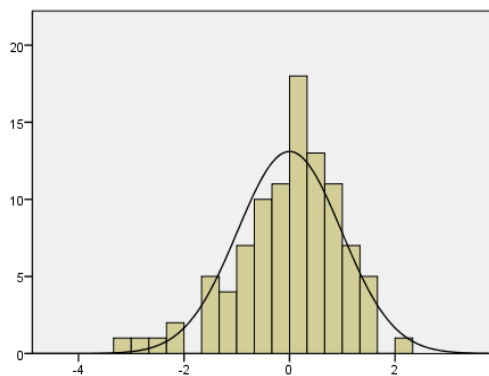
Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot.

Dasar pengambilan keputusan : 1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

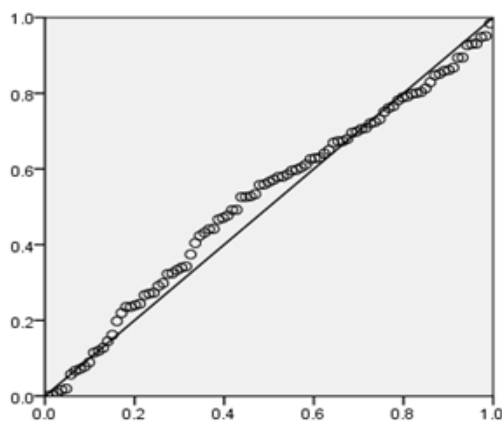
Berikut grafik histogram dan grafik normal P-Plot pada pengujian normalitas yaitu :

Gambar 1
Grafik Histogram



Sumber : Data Olahan (2015)

Gambar 2
Grafik Normal



Sumber : Data Olahan (2015)

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflasing Factor* (VIF). Syarat bagi suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2006).

Tabel 3
Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X_1)	0.978	1.022	Bebas Multikolinieritas
Pengawasan Keuangan daerah (X_2)	0.983	1.017	Bebas Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)	0.989	1.0112	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data Olahan (2015)

Pada tabel 3 hasil perhitungan nilai VIF pada *full model* menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (D-W). Menurut Ghozali (2009:80) menjelaskan panduan mengenai angka D-W untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat diambil patokan sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka berarti tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.404 ^a	.163	.136	2.947	1.779

Sumber : Data Olanan, 2015

Pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) pada variabel independen menunjukkan nilai 1.779 dengan berkisar diantara -2 sampai +2, berarti autokorelasi tidak ada pada variabel regresi atau independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

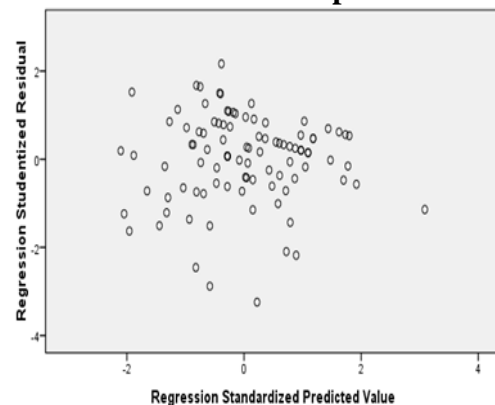
regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Adapun dasar analisisnya sebagai berikut:

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 3
Grafik Scatterplot



Sumber : Data Olanan, 2015

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS. Penelitian ini mempunyai 3 hipotesis yang diuji

dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis pertama tentang Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (X1) terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Kedua, Pengawasan Keuangan Daerah (X2) terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Ketiga, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan pada pengolahan data yang menggunakan software SPSS maka didapatkan suatu model regresi berganda sebagai berikut :

Tabel 5
Koefisien Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.621	4.228		7.242	.000
	KPPK	.156	.061	.246	2.569	.012
	PKD	.292	.101	.276	2.884	.005
	PTI	.098	.047	.201	2.105	.038

Sumber : Data Olahan, 2015

Dari Tabel 5 diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 30.621 + 0.156 (X_1) + 0.292 (X_2) + -0.098 (X_3) + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (α) sebesar 30.621. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 30.621.
- Nilai koefisien regresi kompetensi pejabat penatausahaan keuangan sebesar 0.156. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan

kompetensi pejabat penatausahaan keuangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.156.

- Nilai koefisien regresi pengawasan keuangan daerah sebesar 0.292. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengawasan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.292.
- Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.098. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.098.

Uji Koefisien Determinasi

Dalam uji linear berganda, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.404 ^a	.163	.136	2.947

Sumber : Data Olahan, 2015

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 6 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.136. Artinya sumbangan pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, pengawasan keuangan daerah dan pemanfaatan

teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13.6%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik t

Uji t ini merupakan pengujian terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30.621	4.228		7.242	.000
KPPK	.156	.061	.246	2.569	.012
PKD	.292	.101	.276	2.884	.005
PTI	.098	.047	.201	2.105	.038

Sumber : Data Olahan, 2015

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Dari hasil Penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel (2.569) yang lebih besar

dari t tabel (1.986) maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima.

2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel (2.884) yang lebih besar dari t tabel (1.986) maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel (2.105) yang lebih besar dari t tabel (1.986) maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima.
4. Koefisien determinasi penelitian ini adalah 13.6% sedangkan sisanya (86.4%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. seperti sistem pengendalian internal, kualitas sumberdaya manusia, faktor eksternal, dukungan pimpinan, tim organisasi, dll.

Keterbatasan

Penelitian ini masih banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu daerah. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas maupun digeneralisir kesemua

- objek mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pada penelitian ini jumlah sampel masih terbatas, akan memberikan hasil yang lebih baik lagi jika sampel yang digunakan lebih banyak.
 3. Penelitian ini kurang mengeksplorasi indikator lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya mungkin bisa mempertimbangkan sistem pengendalian internal, kualitas sumberdaya manusia, faktor eksternal, dukungan pimpinan, tim organisasi, dll.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di kota/kabupaten lainnya bahkan se-Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen seperti sistem pengendalian internal, kualitas sumberdaya manusia, faktor eksternal, dukungan pimpinan, tim organisasi yang memungkinkan dalam mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Meskipun dalam konteks yang kecil namun hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika (Teori, Konsep dan aplikasi dengan SPSS 17)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indrawati, Dwi Anita. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.51 Tahun 2010, Tentang Pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan, Edisi ke-3 BPFE, Yogyakarta.

Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta : ANDI.

Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan*. www.itjenkemdagri.go.id

Yuliarta. 2013. *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)*. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang.